

RESPON IRAN TERHADAP KEBIJAKAN COERCIVE DIPLOMACY AMERIKA SERIKAT TERKAIT ISU NUKLIR

Oleh: Inda Permata Asi

Email: Indapermataasi08@gmail.com

Advisor: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

Email: ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28193

Telp/Fax: 07561-63277

Abstract

Iran's nuclear enrichment was initially carried out with the United States in 1957 which was marked by the existence of the Nuclear Cooperation Agreement. However, the cooperation between Iran and the United States ended at the time of the Iranian revolution in 1979. The United States assumed that Iran was making weapons of mass destruction and demanded that Iran stop its nuclear program. However, Iran continued its nuclear program. To oppose Iran's nuclear program, the United States carried out a policy of coercive diplomacy against Iran so that Iran submits to the will of the United States and Iran's nuclear program can be stopped. This paper will discuss how Iran's response in dealing with the coercive diplomacy imposed by the United States on Iran and whether or not the coercive diplomacy policy of the United States and its allies towards Iran was effective because the results of the coercive diplomacy policy carried out by the United States against Iran were not successful because there were factors. The factors that make Iran still able to carry out its nuclear program such as the supply of nuclear manufacturing materials from Russia, the JCPOA agreement on the Iran nuclear program agreement and also the absence of Iran's nuclear findings that deviate by the IAEA.

Keywords: *America's Coercive Diplomacy , JCPOA, Iran's nuclear*

PENDAHULUAN

Iran mulai merancang Program Nuklir pada tahun 1957 bekerjasama dengan Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya *Nuclear Cooperation Agreement*. hingga pada tahun 1960 program ini dapat diberlakukan ketika Amerika mensuplai lima megawatt reaktor ternal (Thernal Research Reactor) dan dibangunnya fasilitas nuklir Iran pertama yaitu *Teheran Nuclear Research Center (TNRC)* pada tahun 1967.¹

Non-Proliferasi Nuklir atau *Nuclear Proliferation Treaty (NPT)* di tandatangani oleh Iran pada tahun 1968, Hingga Pada tahun 1974 Iran membentuk organisasi yaitu *Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)*. Berbagai kesepakatan dengan negara lain dalam bidang nuklir diperoleh oleh Iran di antaranya, kesepakatan dengan Kraftwerk Union (KWU) yaitu perusahaan pemasok pembangkit listrik terkemuka Internasional yang berasal dari Jerman, kesepakatan dengan Jerman Barat yaitu untuk pembangunan dua reaktor di Bushsher dengan kapasitas 1.200 megawatt lalu juga terdapat sumbangan dua reaktor berkapasitas 900 megawatt dari perusahaan Perancis.²

Pada tahun 1979 terdapat revolusi Iran yang merubah struktur politik Iran dari monarki absolut menjadi pemerintahan Republik Islam. Ayatollah Khamenei

adalah seorang ulama Iran yang memimpin pergerakan Revolusi Iran dan menjadi teolog islam pertama yang mempraktikkan gagasan pemerintahan islam di dunia modern, dengan menjadikan ulama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Iran menganut sistem demokrasi dengan memilih presiden melalui pemungutan suara rakyat.

Setelah perolehan suara didapat kandidat suara terbanyak akan langsung bisa memimpin jika sudah disetujui oleh *faqih* atau ulama yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi Iran yang dipegang oleh Ayatollah Khamenei.³

Pada masa kepemimpinan Khamenei perkembangan nuklir mulai pesat pada tahun 1980 yaitu kerika perang antara Iran dan Irak karena keberadaan Irak yang mengancam atas keberadaan nuklirnya.

Sejak saat itu program nuklir terus dikembangkan hingga pada tahun 1985 Iran memulai untuk mengembangkan program sentrifugal gas dan berhasil mengakuisisi komponen kunci sentrifugal pada tahun 1987. *International Atomic Energy Agency (IAEA)* yaitu organisasi yang dibentuk untuk mempromosikan penggunaan nuklir secara damai, mengetahui kejadian tersebut dan berbagai kesepakatan dalam program nuklir Iran dengan negara lain pun dibatalkan hingga diberlakukan pembekuan aset-aset Iran yang ada di bank Amerika sebagai bentuk kecaman terhadap Iran.⁴

¹ Resty Meiva Rizky, "Perubahan Kebijakan Nuklir Iran Di Era Pemerintahan Hassan Rouhani," *jom fisip* 02, no. 02 (2015): 1–16, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7530>.

² Kiki Mikail and Achmad Fathoni, "Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Iran (1957- 2006 M)," *Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang* 3, no. 1 (2017): 1–16, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4064>.

³ Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1–19, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/194>.

⁴ Bella Fokker Andini, "Perbandingan Kebijakan AS Terkait Nuklir Iran: Era George Walker Bush Dan Barack Hussein". *Jurnal FISIP Unair*. 6, No. 2 (2017): 229–242.

Namun, sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran tidak membuat Iran terhenti untuk melakukan aktifitas nuklir hingga pada saat Hassan Rouhani terpilih menjadi presiden pada tahun 2013 terbentuklah kesepakatan nuklir Iran atau yang biasa disebut JCPOA pada tahun 2015 dengan negara penandatangan yaitu AS, Cina, Perancis, Jerman, Rusia dan Inggris atau yang dikenal dengan sebutan negara P5+1

Isi dalam kesepakatan tersebut yaitu:

1. Iran menurunkan *stockpile uranium* dengan kandungan lemah 98 persen dan disepakati akan dijalankan selama 15 tahun.
2. Iran mengganti dua per tiga cadangan uranium dan hanya menggunakan fasilitas yang ada di Natanz dan disepakati akan dijalankan selama sepuluh tahun.
3. Iran menahan diri dalam segala bentuk pembangunan fasilitas nuklir selama 15 tahun.
4. Iran mengurangi aktifitas uranium di Fordow dan menjadikannya sebagai tempat fisik nuklir dan teknologi selama 15 tahun.
5. Iran mematuhi protokol tambahan selama tergabung dalam keanggotaan NPT.
6. Iran bersedia apabila dilakukan Inspeksi dan pengecekan oleh IAEA.
7. kesepakatan ini berisi prosedur penyelesaian masalah apabila sewaktu-waktu Iran tidak mematuhi kesepakatan.⁵

⁵ Milena Sterio, "President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement?," *Case Western Reserve Journal of International Law* 48, No. 1/2 (2016): 69–82.

Sejak kesepakatan itu ditandatangani Iran mulai dilonggarkan dari berbagai macam sanksi.

Setelah dua tahun Iran menjalankan kesepakatan tersebut namun, terdapat kebijakan baru mengenai isu nuklir setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru, pada tahun 2017 Trump dalam sidang umum PBB menolak adanya kesepakatan JCPOA karena dapat mengancam keamanan negara.

Setahun setelah pernyataan Trump disampaikan, pada 8 Mei 2018 Amerika Serikat resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir dan memutuskan secara sepihak untuk kembali memberi sanksi terhadap Iran.⁶

PEMBAHASAN

Hubungan antara AS dan Iran mulai renggang pada saat terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979, penolakan terhadap warga lokal terhadap kebijakan Shah Reza Pahlevi AS yang merugikan warga lokal atas ketidakadilan dengan cara berusaha untuk memodernisasi ekonomi Iran melalui industrialisasi yang disebut sebagai "Revolusi Putih" hal ini terjadi atas dorongan dari Amerika Serikat.⁷

Kebijakan tersebut memunculkan aksi protes dari masyarakat Iran lalu melakukan aksi massa pada 4 November 1979 atas inisiatif dari aktivis yang tergabung dalam garis pengikut imam, aliansi mahasiswa pendukung revolusi Iran berbagai Universitas di Iran. Aksi massa tersebut bertujuan untuk menduduki Kedubes AS yang ada di Iran dengan maksud untuk menunjukkan pada dunia

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

mengenai kontribusi mereka terhadap revolusi Iran.⁸

Setelah berhasil menduduki kedubes AS para mahasiswa pun menyandera sebanyak 66 warga AS yang berada di dalam kedubes. Lalu, mahasiswa mengadakan konferensi pers agar melakukan pendeportasian terhadap Shah Reza Pahlevi yang saat itu berada di AS, para mahasiswa juga menuntut agar AS meminta maaf kepada Iran atas intervensinya terhadap politik dalam negeri Iran, dan menginginkan kembali aset-aset Iran yang dibekukan di bank-bank AS karena pada saat penyanderaan terjadi AS memberi sanksi terhadap Iran berupa pembekuan aset-aset Iran yang ada di bank AS sebagai upaya untuk dapat membebaskan para sandera⁹

Pada akhirnya di tahun 1981 Aljazair menjadi negosiator antara AS Iran dan menyepakati agar Iran membebaskan para sandera dan AS melakukan pencairan terhadap aset-aset Iran yang dibekukan.¹⁰

Tahun 1984 IAEA mendapat temuan bahwa Iran melakukan upaya untuk meluncurkan senjata nuklir. Penemuan ini berupa pengumuman oleh Presiden Iran Ali Khomeini kepada pejabat tinggi Iran untuk meluncurkan nuklir Iran karena Iran menilai hal ini adalah satu-satunya cara untuk dapat mengamankan revolusi Islam Iran dari

skema-skema musuh terutama AS dan sekutunya¹¹ akibatnya berbagai kesepakatan dalam program nuklir Iran dengan negara lain pun dibatalkan dan AS memberlakukan sanksi berupa pembekuan aset-aset Iran yang ada di bank AS sebagai bentuk kecaman terhadap Iran.¹²

Program nuklir Iran masih dapat berlanjut dengan sanksi yang dijatuhkan oleh AS kepada Iran karena Iran masih dapat menjalin kerjasama dengan negara lain seperti terbukti pada tahun 1989 Iran berhasil menjalin kerjasama nuklir dengan Argentina dan kerjasama dengan Rusia tahun 1992, hubungan kerjasama ini terjalin karena Iran berhasil meyakinkan bahwa program nuklir tersebut adalah untuk kepentingan nasional.¹³

Kerjasama nuklir Iran dengan negara lain tak membuat AS yakin sehingga, pada tahun 1996 AS mengeluarkan *Iran Sanction Act* pada Perusahaan dan Individual yang menyokong perindustrian minyak Iran. Walaupun demikian Iran masih dapat melanjutkan program nuklirnya hingga tahun 2002 Iran mengumumkan bahwa Iran sudah melakukan pengembangan listrik tenaga nuklir dan setahun kemudian Iran mengumumkan mengenai kemampuannya dalam pengayaan uranium karena adanya bantuan dari Rusia namun, kerja sama antara Rusia dan Iran mendapat banyak pertentangan dari AS.¹⁴

karena semakin meningkatnya perhatian internasional khususnya AS terhadap nuklir Iran membuat IAEA

⁸ Tirto, "444 Hari Krisis Penyanderaan, Bibit Perseteruan AS-Iran," last modified 2018, accessed June 14, 2021, <https://tirto.id/444-hari-krisis-penyanderaan-bibit-perseteruan-abadi-as-iran-c88A>.

⁹ Rosiana Haryanti, "Hari Ini Dalam Sejarah: Pengepungan Kedubes AS Di Iran Selama 444 Hari," *Kompas*, last modified 2019, accessed November 23, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/04/053300065/hari-ini-dalam-sejarah--pengepungan-kedubes-as-di-iran-selama-444-hari?page=all>.

¹⁰ Haryanti.

¹¹ Mikail and Fathoni.

¹² Andini.

¹³ Mikail dan Fathoni, "Program Pengembangan Nuklir Iran Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Iran (1957- 2006 M)."

¹⁴ Resty Meiva Rizky, "Perubahan Kebijakan Nuklir Iran Di Era Pemerintahan Hassan Rouhani," *jom fisip* 02, no. 02 (2015): 1-16.

melakukan kunjungan inspeksi ke fasilitas nuklir Iran tahun 2003 dan mengajukan protokol tambahan untuk program nuklir Iran.

Protokol tambahan tersebut lalu ditolak oleh Iran dan memilih untuk melanjutkan program nuklirnya akibatnya Iran diberi tambahan sanksi oleh AS berupa pembekuan semua aset Iran yang disimpan di AS termasuk kepemilikan AEOI lalu memberi batasan dan pencegahan terhadap perusahaan yang menjual peralatan penunjang program nuklir.¹⁵

Permasalahan mengenai nuklir Iran IAEA merujuk permasalahan tersebut ke DK PBB dan mengeluarkan resolusi kepada Iran yang bermaksud agar Iran menghentikan segala bentuk pengayaan uraniumnya. Namun, Iran menyangkal resolusi tersebut dan memilih untuk tetap melanjutkan pengayaan uraniumnya. Bahkan PBB sampai mengeluarkan 5 resolusi kepada Iran pada tahun yang berbeda-beda diantaranya yaitu:

1. Resolusi 1696, panggilan IAEA kepada Iran untuk menghentikan pengayaan terkait dan pengolahan yang mengikat secara hukum untuk pertama kalinya.
2. Resolusi 1737 (2006), memberlakukan sanksi ekonomi termasuk komersial terhadap 10 entitas penting yang terkait dalam program nuklir dan balistik.
3. Resolusi 1747 (2007), pembekuan 13 aset entitas baru yang berubungan dengan program nuklir maupun pengawal revolusi Iran, pemberlakuan embargo pembelian senjata dan

¹⁵ Rizky.

- pemberian batasan pinjaman ke Iran.
4. Resolusi 1803 (2008), larangan terhadap entitas maupun individu dengan membekukan aset dan larangan perjalanan.
 5. Resolusi 1929 (2010), pembatasan baru pada investasi Irandan melarang penjualan ke Iran dari senjata berat tertentu seperti tank, pesawat tempur, dan helikopter.¹⁶

AS juga memberikan 12 tuntutan terhadap Iran diantaranya:

1. Iran harus mendeklarasikan kepada IAEA (Badan Energi Atom Internasional) secara lengkap laporan program nuklirnya dan secara permanen serta terverifikasi meninggalkan program nuklirnya untuk selamanya.
2. Iran harus menghentikan pengayaan dan tidak boleh melakukan pemrosesan ulang plutonium termasuk menutup reaktor nuklirnya.
3. Iran harus memberikan akses tanpa batas kepada IAEA untuk memasuki seluruh situs program nuklirnya di seluruh penjuru Iran.
4. Iran harus mengakhiri pengembangan program rudal balistiknya dan menghentikan peluncurannya serta menghentikan pengembangan lebih lanjut sistem rudal berkemampuan nuklir
5. Iran harus membebaskan semua warga AS serta warga dari sekutu AS yang ditahan atas tuduhan palsu
6. Iran harus mengakhiri dukungannya untuk kelompok

¹⁶ Rizky.

teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah Lebanon, Hamas, dan kelompok Jihad Islam Palestina.

7. Iran harus menghormati kedaulatan Pemerintah Irak dan mengizinkan perlucutan senjata, membubarkan dan reintegrasi milisi Syiah
8. Iran harus mengakhiri dukungan militernya kepada kelompok milisi Houthi dan bekerja untuk penyelesaian politik damai di Yaman
9. Iran harus menarik semua pasukannya dari seluruh wilayah Suriah
10. Iran harus mengakhiri dukungannya untuk Taliban dan teroris lainnya di Afghanistan dan sekitarnya, serta berhenti menyembunyikan pemimpin senior al-Qaeda.
11. Iran harus mengakhiri dukungan pasukan Garda Revolusi Islam (IRG) untuk teroris dan sekutu militan di seluruh dunia
12. Iran harus menghentikan segala tindakan dan perilaku yang mengancam negara-negara tetangganya, termasuk berhenti mengancam Israel, berhenti menembakkan rudal ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab serta berhenti mengancam pelayaran internasional hingga serangan siber.¹⁷

Trump mengancam untuk menjatuhkan *'the toughest ever sanctions'* kepada Iran jika tidak memenuhi tuntutan AS dalam periode waktu yang ditentukan. itu akan

¹⁷ Hermanto Deli, 'Inilah 12 Daftar Ultimatum Amerika Serikat Terhadap Iran', *Moslem Today*, 2018 <<https://www.moslemtoday.com/inilah-12-daftar-ultimatum-amerika-serikat-terhadap-iran/>> [accessed 1 January 2022].

dilakukan dengan cara mengimplementasikan kembali semua sanksi yang telah dihapus melalui kesepakatan JCPOA serta menerapkan berbagai sanksi baru yang dapat menekan Iran secara maksimal. Sanksi tersebut akan diberlakukan secara bertahap ke dalam dua tenggat waktu, yaitu 90 hari dan 180 hari.¹⁸

Namun, tuntutan AS tersebut tidak dituruti oleh Iran sehingga sanksi pun mulai diberlakukan oleh AS terhadap Iran.

Sanksi Pertama

Sebagian sanksi AS mulai berlaku secara efektif pada tenggat waktu pertama tanggal 7 Agustus 2018 dan sebagian lainnya berlaku secara penuh pada tanggal 5 November 2018. Pada tenggat waktu pertama, AS memberlakukan sanksi terhadap pembelian dolar AS; perdagangan emas, logam mulia, aluminium, baja, batu bara dan perangkat lunak; serta transaksi yang berkaitan dengan utang luar negeri dan sektor otomotif. Selain itu, dua lisensi yang memungkinkan Iran untuk mengekspor bahan makanan tertentu ke AS dan membeli pesawat komersial juga dicabut.¹⁹

Sanksi Kedua (*Maximum Pressure*)

Pada tenggat waktu yang kedua, AS melalui Departemen Keuangannya juga mulai mengimplementasikan sanksi penuhnya terhadap Iran, khususnya terhadap sektor-sektor ekonomi krusial Iran, seperti sektor

¹⁸ Muhammad H. Rahim, 'Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran', *Icmes*, 3.1 (2019), 27–52 <<https://icmes.org/jurnal/index.php/jurnalICMES/article/download/42/28/>>.

¹⁹ Rahim.

ekspor minyak yang notabene merupakan tonggak perekonomian Iran, sektor perbankan dan sektor transportasi. Selain itu, sanksi tersebut juga mencakup sanksi terhadap 50 bank Iran beserta anak perusahaannya, black list terhadap lebih dari 200 orang dan kapal di sektor pengirimannya, juga sanksi terhadap maskapai penerbangan nasional Iran (Iran Air) beserta lebih dari 65 unit pesawatnya.

sanksi juga berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan dagang dengan Iran, terkecuali pihak-pihak yang mendapatkan pengecualian dari AS melalui mekanisme oil sanctions waivers sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh AS yaitu 2 Mei 2019²⁰

Tindakan AS tersebut mendapat pertentangan dari Cina, Perancis, Jerman, Rusia dan Inggris selaku negara penandatangan JCPOA, negara tersebut menilai program nuklir Iran berada dalam pengawasan IAEA dan selama pemantauan tidak terdapat penyimpangan terhadap program nuklir Iran.

Kontra dari negara P4+1 terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh AS membuat perekonomian Iran masih dapat stabil sehingga pada tahun 2019 AS menjatuhkan sanksi berat yang pernah didapat oleh Iran atau yang biasa disebut sebagai Maximum Pressure, sanksi tersebut berupa dijatuhkan sanksi terhadap bank sentral Iran yang berupa larangan pada setiap orang yang terlibat dalam bank sentral Iran atau akan menghadapi tuntutan. Lalu, departemen keuangan AS juga menambah sanksi dengan alasan tambahan yaitu terorisme.²¹

Respon Iran Terhadap Coercive Diplomacy Amerika Serikat

Negara P4+1 berkomitmen untuk mempertahankan JCPOA dan memilih untuk tidak ikut AS meninggalkan kesepakatan JCPOA hal ini dinilai lebih efektif agar nuklir Iran tetap dapat terpantau penggunaan nuklirnya sehingga tidak melampaui batas ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.²²

Sikap Iran Dalam JCPOA

Mengenai sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS, Iran merespon kebijakan AS tersebut dengan menyatakan tetap berada dalam kesepakatan JCPOA, Iran juga tidak ingin terpancing keluar dari JCPOA karena sanksi yang dijatuhkan oleh AS. Karena apabila Iran terprovokasi untuk keluar dari JCPOA, hal tersebut hanya akan memberlakukan kembali sanksi multilateral yang pernah dijatuhkan sebelumnya. Dengan maksud AS menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam situasi ini.

Tidak sesuai dengan tujuan dan harapan AS, Iran sejauh ini dengan tegas menolak untuk membuat kesepakatan baru dengan AS dan tidak ada satu pun negara penandatangan lainnya yang mengikuti langkah AS, terkhusus Inggris, Perancis dan Jerman yang notabene merupakan aliansi tradisional AS. ketiga negara tersebut beserta Rusia dan Tiongkok justru menunjukkan komitmennya, untuk mempertahankan kesepakatan JCPOA tersebut.²³

multilateral tersebut membuat langkah unilateral AS dengan menerapkan 'toughest ever sanctions' kepada Iran semakin terkesan illegitimate. Terlebih, banyak negara

²⁰ Rahim.

²¹ Rahim.

²² Afrizal.

²³ Rahim.

yang terus memberikan dukungan terhadap keberlangsungan kesepakatan nuklir tersebut

Pada sisi lain, Iran juga ingin mempertahankan dukungan internasional terhadapnya, mengingat banyak negara-negara sekutu AS yang juga mengecam keputusan sepihak Trump. Namun pilihan untuk tetap bertahan dan mematuhi secara penuh JCPOA bukanlah pilihan yang permanen bagi Iran karena hal tersebut tergantung bagaimana Respon Uni Eropa dalam memenuhi janjinya namun jika keuntungan tidak diperoleh ketika mematuhi secara penuh JCPOA maka selanjutnya Iran memberi perlawanan dengan mengurangi kepatuhannya terhadap JCPOA opsi ini terbilang strategis ketika negara Penandatanganan gagal dalam memenuhi komitmennya sehingga Iran hanya memiliki dua opsi yang menguntungkan untuk merespon kebijakan AS, yaitu strategi perlawanan (melanggar JCPOA) dan perang.²⁴

Nyatanya tetap tergabungnya Iran dalam keanggotaan JCPOA membuat negara Internasional memihak kepadanya sehingga Iran memberi kebijakan akan tetap berada dalam keanggotaan JCPOA asalkan sanksi yang dijatuhkan AS tidak berpengaruh pada perekonomian Iran dan memberi waktu 60 hari kepada lima negara penandatanganan lainnya untuk dapat melindungi Iran dari sanksi yang diberlakukan oleh AS.²⁵

Iran juga menyatakan jika lima negara tersebut tidak membantu Iran dalam membentengi dari sanksi AS maka Iran akan menaikkan tingkat pengayaan uraniumnya yang bisa saja digunakan sebagai pembuat senjata nuklir, walaupun sebenarnya Iran tidak pernah mempunyai maksud untuk

membangun senjata nuklir.²⁶ Seperti dalam gambaran tabel di bawah ini Iran memang mendapatkan dampak yang besar atas sanksi yang dijatuhkan oleh AS namun Iran tetap berusaha menstabilkan ekonominya dengan tetap pada kebijakannya bertahan pada perjanjian JCPOA.

Iran Melawan Embargo Minyak

Pada tahun 2019 yaitu ketika Maximum Pressure dilakukan AS, Iran menahan kapal tanker milik Inggris yang berada di Selat Hormus. Pasukan keamanan Iran mengumumkan mereka telah menyita kapal tanker milik Inggris di Selat Hormuz karena melanggar aturan kemaritiman internasional.

Inggris, Jerman, dan Perancis merupakan kekuatan utama Eropa dalam melakukan negosiasi dengan Iran untuk menghentikan program nuklir sesuai kesepakatan 2015 dengan kompensasi pencabutan sanksi ekonomi dan embargo minyak Iran.²⁷

Iran dan Negara Mitra

Sekutu AS yang berada di Uni Eropa juga turut dalam memberikan sanksi terhadap Iran sebagai protes terhadap program nuklir Iran sanksi tersebut adalah embargo minyak terhadap Iran UE juga membekukan aset- aset yang dimiliki oleh Bank Sentral Iran, melarang perdagangan logam mulia, berlian dan barang berharga milik badan publik Iran di Eropa. PBB juga turut dalam memberikan sanksi berupa larangan

²⁶ Makruf Baiturohim, "Implikasi Penarikan Diri Amerika Serikat Dari," *Journal Unida Gontor* 6, no. 2 (2015): 279–312.

²⁷ 'Jerman Dan Perancis Desak Iran Bebaskan Kapal Tanker Inggris', *CNN Indonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190720192821-134-413999/jerman-dan-perancis-desak-iran-bebaskan-kapal-tanker-inggris>> [accessed 2 January 2022].

²⁴ Afrizal.

²⁵ Afrizal.

kerja sama dengan bank, asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran.²⁸

Sanksi tersebut berhasil membuat perekonomian Iran turun dan mengakibatkan demonstrasi oleh rakyat Iran yang mengeluh akibat kenaikan harga pangan²⁹. AS turut dalam merespon demonstrasi yang terjadi di Iran dan berjanji akan membantu rakyat Iran, hal ini lalu ditentang oleh Rusia sebagai negara yang tidak sepaham dengan AS, Rusia mengingatkan AS agar tidak mengintervensi masalah internal Iran.³⁰ Iran berusaha untuk menstabilkan perekonomian negara nya dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan cara barter persediaan emas dan minyak dengan pangan ke negara mitranya.³¹

Memperluas Ekspor Minyak Ke Asia

minyak Iran masih terus dapat melakukan transaksi walaupun mendapat embargo dari AS dan UE karena konsumen terbesar minyak Iran berasal dari Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Melihat hal tersebut AS dan UE melakukan pembicaraan dengan Jepang dan Korea Selatan dalam menanggapi pembelian minyak Iran.

AS dan UE meminta agar Korea Selatan dan Jepang menurunkan jumlah pembelian minyaknya kepada Iran agar pembeli lain dapat menuntut pemotongan harga terhadap minyak Iran lalu Jepang dan Korea Selatan menolak untuk ikut dalam memboikot minyak Iran. Iran juga menawarkan minyaknya

²⁸ Pujayanti.

³⁰ Riva Dessthania Suastha, 'Rusia Sebut AS Cari Alasan Untuk Tekan Iran Soal Nuklir', *CNN Indonesia*, 2018 <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180105204619-134-267089/rusia-sebut-as-cari-alasan-untuk-tekan-iran-soal-nuklir>> [accessed 16 December 2021].

³¹ Pujayanti.

dengan harga diskon untuk pelanggan yang ada di Asia, sebagai antisipasi kembali jatuhnya sanksi AS kepada negara tersebut.³²

Rusia dan Cina yang tidak menyetujui adanya peningkatan sanksi terhadap Iran, karena hal tersebut juga tidak dapat mempengaruhi Iran untuk kembali ke perundingan nuklir dan hanya akan mempengaruhi kenaikan harga minyak dunia.³³

KESIMPULAN

Untuk dapat mencapai kepentingannya, AS menggunakan kebijakan koersif dengan menjatuhkan sanksi kepada Iran. Sanksi tersebut bertujuan untuk melumpuhkan perekonomian Iran, sehingga dapat berpengaruh pada pengembangan uranium Iran. AS juga menekan negara-negara lain agar tidak lagi membeli minyak dari Iran dengan begitu, AS berharap Iran bersedia untuk kembali bernegosiasi. Padahal pengalaman sebelumnya (pra JCPOA) memperlihatkan bahwa sanksi bukanlah sebagai opsi yang tepat untuk menghadapi Iran terlebih sanksi yang dijatuhkan oleh AS tidak mendapatkan respon yang baik dari negara internasional.

Iran merespon pemberlakuan sanksi tersebut dengan membalas memberikan aturan tambahan kepada negara sekutu Amerika Serikat yang menjadi konsumen minyak Iran yang berada di kawasan Uni Eropa dan mengancam akan menutup selat Hormuz yaitu jalur strategis perdagangan minyak dunia yang jika

³² Bernhart Farras, 'Antisipasi Sanksi AS, Iran Obral Minyak Untuk Pelanggan Asia', *CNBC Indonesia*, 2018 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/201801162722-17-28318/antisipasi-sanksi-as-iran-obral-minyak-untuk-pelanggan-asia>>.

³³ Pujayanti.

selat tersebut ditutup maka akan dapat berpengaruh pada melonjaknya harga minyak dunia. Hal ini tentu menjadi sorotan bagi negara Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B. F. (2017). *Perbandingan Kebijakan AS Terkait Nuklir Iran : Era George Walker Bush dan Barack Hussein*. 6(2), 229–242.
- Baiturohim, M. (2015). Implikasi penarikan diri amerika serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Journal Unida Gontor*, 6(2), 279–312.
- Budianto, K. (2016). Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati Perjanjian The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Dalam Pembatasan Program Nuklir Iran 2013-2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–11.
- Febriandi, F. (2018). Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1), 1–14.
- Ilmanuarif Shafar, W., & Mutmainah, D. (2020). Resistensi Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat dan Iran: Studi Kasus Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Transformasi Global*, 7(1), 144–175.
- Mikail, K., & Fathoni, A. (2017). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957- 2006 M). *Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 3(1), 1–16.
- Paramasatya, S., & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, 12Paramasa(2), 297-314.
- Pujayanti, A. (2012). Sanksi Ekonomi terhadap Iran dan Dampak Internasionalnya. *Berkas.Dpr.Go.Id, IV(04)*, 5–8.
- Rizky, R. M. (2015). Perubahan Kebijakan Nuklir Iran di Era Pemerintahan Hassan Rouhani. *Jom Fisip*, 02(02), 1-16.
- Rahim, M. H. (2019). Post-JCPOA: Diplomasi Koersif Amerika Serikat Vis-À-Vis Iran. *Icmes*, 3(1), 27-52.
- Saragih, H. M., Lestari, M. M., & Muis, N. (2020). Posisi Republik Islam Iran Dalam Program Nuklir Dalam Perspektif Amerika Serikat. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 1-5.
- Simanjuntak, R. C. C. (2021). Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundur dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Tahun 2018. *JOM FISIP*, 8(2), 1-12.
- Sterio, M. (2016). President Obama's Legacy: The Iran Nuclear Agreement? *Case Western Reserve Journal of International Law*, 48(1/2), 69–82.
- Sundari, R. (2013). *Wacana Program Nuklir Iran sebagai Upaya Deterrence terhadap Amerika Serikat*.
- Zulkarnen, Z. (2017). Budaya Struktur

- Pemerintahan Republik Islam Iran. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 3(1), 1-19.
- Maier, C. S., Craig, G. A., & George, A. L. (1983). Gordon A. Craig and Alexander L. George. Force and Statecraft: Diplomatic Problems of Our Time. *The American Historical Review*, 88(5), 1246-1247.
- Moore, B., & Morgenthau, H. J. (1949). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. In *American Sociological Review* 14(2), 326.
- Afrizal, (2021). 'Strategi Iran Pasca Amerika Serikat Keluar Dari Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018-2020, 8(2) *Jom Fisip*.
- Bahri, M. S. (2012). Penolakan Pemerintah Iran Terhadap IAEA Untuk Melakukan Pemeriksaan Pengembangan Energi Nuklir di Wilayah Negara Iran di Tinjau Dari Perspektif IAEA. In *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Bakri, Umar Suryadi. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (pertama). kencana.
- Bikle, R. C. B. dan S. K. (1992). *Qualitative Research for Education* (kedua). An Introduction to Theories And Methods.
- Dr. Rukin. S.Pd, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ahmar Cendekia.
- George, A. L., & Simons, W. E. (1994). *The Limits of Coercive Diplomacy* (2nd ed.). Westview Press.
- Hardani, Andriani, H., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Qualitative & Quantitative Research Method Book)* (H. Abadi (Ed.); Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Huala Adolf. (2015). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Buku-buku Ilmu Hukum.
- Alcaff, M. (2008). *Perang Nuklir? Militer Iran*. Zahra Publishing House.
- Jensen, L. (1982). *explaining foreign policy* (Englewood cliffs (Ed.)).
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ramadhani, S. A. (2020). *Dampak Embargo Amerika Serikat Terhadap Politik Dalam Negeri Iran di Bawah Kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad*. USU.
- Steans, J., & Pettiford, L. (2009). *Hubungan Internasional - Perspektif dan Tema* (D. silvia Sari & Dkk (Eds.)). Pustaka Pelajar.
- Ulfah, M, L. (2017). *Respon Iran Terhadap Ancaman Nuklir Israel dalam Upaya Mengembalikan Keseimbangan Kekuatan di*

- Kawasan Timur Tengah.*
Dunia. "Iran Bertekad Hasilkan Kesepakatan Nuklir Dunia Informasi Terkini Dari Berbagai Penjuru Dunia." *DW*. Last modified 2013. diakses pada April 17, 2021. <https://www.dw.com/id/iran-bertekad-hasilkan-kesepakatan-nuklir/a-17241494>.
- "Sejarah Baru Perundingan Nuklir Iran Dunia Informasi Terkini Dari Berbagai Penjuru Dunia." *DW*. Last modified 2013. diakses pada April 16, 2021. <https://www.dw.com/id/sejarah-baru-perundingan-nuklir-iran/a-17109871>.
- Haryanti, Rosiana. "Hari Ini Dalam Sejarah: Pengepungan Kedubes AS Di Iran Selama 444 Hari." *Kompas*. Last modified 2019. diakses pada November 23, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/04/053300065/hari-ini-dalam-sejarah--pengepungan-kedubes-as-di-iran-selama-444-hari?page=all>.
- McGinnes, Jamie. "Israeli Nuclear Whistleblower Freed from Jail Again." *The Times*. Last modified 2010. diakses pada November 30, 2021. <https://www.thetimes.co.uk/article/israeli-nuclear-whistleblower-freed-from-jail-again-j88zqnhkzd>.
- Sorongon, Tommy Patrio. "Awas Iran Ngamuk, Ancam Runtuhkan 2 Kota Israel." *CNBC Indonesia*. Last modified 2021. diakses pada November 30, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210309130728-4-228894/awas-iran-ngamuk-ancam-runtuhkan-2-kota-israel>.
- Suastha, Riva Dessthanian. "Rusia Sebut AS Cari Alasan Untuk Tekan Iran Soal Nuklir." *CNN Indonesia*. Last modified 2018. diakses pada Desember 16, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180105204619-134-267089/rusia-sebut-as-cari-alasan-untuk-tekan-iran-soal-nuklir>.
- Tirto. "444 Hari Krisis Penyanderaan, Bibit Perseteruan AS-Iran." Last modified 2018. diakses pada Juni 14, 2021. <https://tirto.id/444-hari-krisis-penyanderaan-bibit-perseteruan-abadi-as-iran-c88A>.
- Triwahyuni, Dewi. "Proliferasi Senjata Nuklir." Repository UNIKOM, 2017. Last modified 2017. diakses pada November 26, 2021. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oFNm5d_j9HEJ:https://repository.unikom.ac.id/
- "Ceasing U.S. Participation in the JCPOA and Taking Additional Action to Counter Iran's Malign Influence and Deny Iran All Paths to a Nuclear Weapon." *The White House*. diakses pada November 21, 2021. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/>.